

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdurrahman, 1985, *Tabaran Pikiran Mengenai Hukum Agraria*, Alumni, Bandung.
- Adami Chazawi, 2014, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Indonesia*, Media Nusantara Creative, Malang.
- Adrian Sutedi, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bernhard Limbong, 2012, *Konflik Pertanahan*, Pustaka Margaretha, Jakarta.
- B.F. Sihombing, 2019, *Sistem hukum PPAT dalam hukum tanah Indonesia*, Kencana Jakarta.
- Burhan Ashsofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Febby Mutiara, 2019, *Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H. Salim, HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- R. Soesilo, 1973, *KUHP Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

## UNDANG – UNDANG

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pemberantasan Korupsi.

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

## JURNAL

Hariyanto dalam Hardiningsih dalam Eka Prasetya Naraza, 2022 Sejak Muda Sadar

*Pajak-Peran Generasi Milenial Dalam Peningkatan Pengetahuan Untuk*

*Kepatuhan Wajib Pajak Demi Pemulihan Ekonomi*, Universitas Internasional

Batam.

Kurnia Putri, 2017, Perbedaan *Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas Dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tidak Lunas*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Nur Hayati, 2016, *PERALIHAN HAK DALAM JUAL BELI HAK ATAS TANAH Suatu Tinjauan Terhadap Perjanjian Jual Beli Dalam Konsep Hukum Barat Dan Hukum Adat Dalam Kerangka Hukum Tanah Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta.

#### INTERNET

<https://jateng.gatra.com>, KPK Dalam Kasus Rafael Alun Lewat Dua Orang Notaris PPAT, di akses pada 25 April 2024.

<https://www.kompas.com>, Penjualan Aset Dibawah NJOP, diakses pada 7 Januari 2024.

<https://www.kumparan.com>, Harga Tanah yang Dibeli Tak Sesuai dengan Akta AJB, Harus Bagaimana? di akses pada 7 juni 2024

<https://malukupost.com>, PPAT Crisdy Lewerissa Dipolisikan Terkait Pemalsuan AJB, diakses pada 25 April 2024.

<https://www.pajakku.com>, Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, diakses pada 7 juni 2024

<https://www.suara.com>, Pengertian Korupsi Lengkap dengan Unsur-unsur, Jenis, dan Dampaknya, di akses pada 25 April 2024.

<https://www.viva.co.id>, Dua Oknum PPAT Kasus Nirina Zubir Ditahan, di akses pada 25 April 2024.

<https://www.viva.co.id>, Etika Notaris PPAT dalam Kasus Mafia Tanah Nirana Zubir

di akses pada 25 April 2024.

